



Hibah Provinsi Belum Cair, Desa Pakraman dan Subak 'Gigit Jari'



WAKIL dari desa pakraman dan subak se-Kabupaten Badung mengikuti sosialisasi pencairan dana BKK dari Pemprov Bali di Puspem Badung, Senin (8/6).
• NUSABALI/ARI SISWANTO

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015
Hal : 2



MANGUPURA, NusaBali

Desa Pakraman dan Subak se-Kabupaten Badung harus gigit jari karena Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali tahun 2015, belum turun. Pemprov Bali beralih bantuan hibah tersebut belum cair karena terbentur aturan yang dikeluarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

"Masalah bantuan hibah masuknya bisa tapi keluar sulit. Karena keluarnya harus berbentuk kegiatan, tidak gelondongan lagi. Tidak berupa uang tapi berupa kegiatan, itu berdasarkan Permendagri 113 yang ditetapkan Desember 2014," ungkap Kepala Bidang Nilai-nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Made Suidiana, saat memberikan sosialisasi pencairan dana hibah dari Provinsi Bali, Senin (8/6), kepada 214 subak yeh, subak abian, dan 122 desa pakraman se-Kabupaten Badung di Puspem Badung.

Keluarnya aturan ini yang menghalangi langkah Pemprov Bali menyalurkan bantuan hibah kepada desa pakraman maupun subak. Sebab terbentur regulasi itu lah, pencairan BKK yang mestinya bulan ini, namun harus molor. Sehingga pihaknya terpaksa harus mencari cara agar pencairan dana BKK bisa dilakukan.

"Kami sudah berkonsultasi ke Mendagri dan untuk di Bali sudah diberikan kekhususan. Artinya intinya diberikan keleluasaan oleh pusat bisa menerapkan aturan yang sebelumnya yakni Permendagri No 37/2007, BKK boleh gelondongan diturunkan ke desa pakraman dan subak," jelasnya.

Kini, imbu Suidiana, pencairan dana BKK tergantung sepenuhnya dari proposal masing-masing desa di Ba-

dung. Sebab nanti anggaran yang bakal diterima desa pakraman sebesar Rp 200 juta dan subak yeh maupun subak abian masing-masing sebesar Rp 50 juta akan masuk ke rekening desa.

"Sekarang tergantung di desa, makin cepat makin bagus. Kalau bisa Juli semua sudah masuk (proposalnya, *Red*), sehingga bisa diproses. Kalau sudah semua terkumpul, tinggal buat SK Gubernur," kata Suidiana. "Setelah itu beres langsung uang ditransfer ke rekening desa, dari desa baru disalurkan ke desa pakraman dan ke subak," tandasnya.

Meski tahun ini diberikan kekhususan, tidak demikian dengan tahun 2016 mendatang. Seluruh desa pakraman dan subak se-Bali tahun depan harus mengikuti persyaratan seperti tertuang dalam Permendagri 113 itu. Yakni bantuan yang diterima tidak lagi berupa uang gelondongan, melainkan dalam bentuk kegiatan.

"Tahun 2016 wajib mengikuti aturan yang baru. Di desa pakraman dan subak menguraikan apa yang dibuat dalam bentuk kegiatan, disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diturunkan dari Dinas Kebudayaan dan Peraturan Gubernur Bali. Kegiatan itu diajukan melalui desa," beber Suidiana. Nah, dari proposal kegiatan itulah, bantuan dari provinsi bisa dicairkan.

Sementara, Kepala Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, meminta agar seluruh desa pakraman dan subak agar mengikuti arahan, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dalam pencairan dana hibah dari provinsi tersebut. Khawatirnya, salah-salah bisa jadi temuan. "Walaupun tidak mengambil uang, tapi secara prosedur salah, bisa jadi temuan," tandasnya. as

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 2



Lagi, Dua Pejabat PD Parkir Diperiksa

★ Kasus Perjalanan Dinas Segera Rampung

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kembali melanjutkan pemeriksaan terkait dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar. Kali ini, dua pejabat PD Parkir setingkat Kepala Seksi (Kasi) diperiksa oleh tim penyidik.

Dua kasi yang diperiksa di Kejari Denpasar pada Senin (8/6), yaitu Kasi Umum dan Kepegawaian, I Gede Ngurah Ardana dan Kasi Keuangan, I Dewa Gede Putra Luhur Adnyana. "Keduanya sudah diperiksa tadi. Total sudah ada empat saksi yang kami periksa selama proses penyelidikan ini," jelas Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir dalam jumpa pers di lobby Kejari Denpasar. Ia mengatakan pemeriksaan masih akan berkesinambungan pada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan parkir. Di antaranya terkait penyertaan modal, pemasukan dari juru parkir dan karcis parkir, terkait sistem perparkiran dan beberapa pendapatan PD Parkir serta cara pembagiannya. Namun Syahrir enggan merinci hasil pe-

meriksaan dengan alasan bisa mengganggu jalannya penyelidikan. "Untuk sementara itu saja yang bisa kami sampaikan," lanjutnya.

Sementara itu, dalam kasus perjalanan dinas di Pemkot Denpasar, penyidik akan memanggil ulang beberapa saksi yang sudah sempat diperiksa. Namun Syahrir belum mau memberikan nama-nama saksi yang akan dipanggil. "Ya tunggu saja. Kamis mendatang akan kami panggil ulang," bebernya.

Seperti diketahui, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi terkait dugaan penyimpangan perjalanan dinas ini. Terakhir Kabag Keuangan Pemkot Denpasar, Made Windra yang diperiksa. Selain itu, beberapa pejabat di Sekretariat DPRD Kota Denpasar juga telah menjalani pemeriksaan.

Syahrir menegaskan untuk kasus perjalanan dinas tinggal menunggu waktu untuk penetapan tersangka. "Kasus ini sudah mau selesai. Tinggal pemeriksaan beberapa saksi lagi kita bisa lanjutkan ke penyidikan," pungkasnya. rez

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 5



Pemprov Bali Pertahankan WTP

★ Dari 9 Kabupaten/Kota, 6 Dapat WTP, 3 Masih WDP

PRESTASI DAERAH DI BALI ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN DUA TAHUN TERAKHIR

NO	LEVEL	OPINI DARI BPK	
		2014	2015
1	Pemprov Bali	WTP	WTP
2	Pemkot Denpasar	WTP	WTP
3	Pemkab Tabanan	WDP	WTP
4	Pemkab Buleleng	WDP	WTP
5	Pemkab Gianyar	WDP	WTP
6	Pemkab Jembrana	WDP	WTP
7	Pemkab Badung	Tak Wajar	WTP
8	Pemkab K'asem	WDP	WDP
9	Pemkab Klungkung	WDP	WDP
10	Pemkab Bangli	Disclaimer	WDP



Gubernur Pastika (tengah) didampingi Adi Wiryatama (kiri) saat terima penghargaan WTP dari BPK, Senin (8/6).

DENPASAR, NusaBali

Setelah 'naik kelas' setahun yang lalu, Pemprov Bali kembali menunjukkan prestasi tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014. Penilaian tertinggi ini diperoleh setelah BPK melakukan audit terhadap 1.000 item laporan keuangan.

Hasil audit LKPD Tahun Anggaran

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015
Hal : 1



Pemprov Bali Pertahankan WTP

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

2014 berupa rapor tertinggi WTP ini telah diserahkan Anggota III BPK RI, Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi, dalam sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (8/6). Sidang paripurna kemarin dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama (Fraksi PDIP), didampingi Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar).

Dalam sidang paripurna penyerahan hasil audit LKPD Tahun Anggaran 2014 berisi rapor WTP oleh BPK RI kemarin siang, Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta, Sekprov Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, Inspektorat Provinsi Bali Ketut Teneng, dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov Bali.

Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi menyatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK hingga menghasilkan opini WTP bagi Pemprov Bali ini mengacu kepada laporan keuangan yang diserahkan 31 Maret 2015 lalu. Pemeriksaan dimulai 9 April sampai 19 Mei 2015. Pemeriksaan penilaian atas bukti-bukti yang mengandung jumlah standar akuntansi pemeritahan, penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, dan efektivitas pengendalian internal.

Menurut Eddy Mulyadi, Pemprov Bali telah menunjukkan sikap responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ada 26 rekomendasi dari BPK Tahun 2014 yang ditindaklanjuti Pemprov Bali. "Neraca Provinsi Bali per 31 Desember 2014, laporan realisasi anggaran, laporan keuangan disajikan dengan wajar, sehingga BPK memberikan opini WTP," papar Eddy Mulyadi di hadapan sidang paripurna DPRD Bali, Senin kemarin.

Namun, Eddy Mulyadi mengingatkan bahwa WTP bukanlah realisasi capaian pembangunan. "WTP yang diraih tentunya akan semakin baik kalau dibarengi dengan kesejahteraan rakyat di Provinsi Bali. Opini WTP ini harus dipertanggungjawabkan dengan kesejahteraan rakyat. Pertanggungjawabkanlah setiap rupiah yang digunakan," katanya.

BPK RI pun langsung meminta DPRD Bali untuk menindaklanjuti apa yang menjadi penilaiannya. Sebab, kata Eddy Mulyadi, ada 1.000 rekomendasi BPK yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti. "BPK minta DPRD Bali nanti

membahas apa yang menjadi kewenangannya."

Eddy Mulyadi menyebutkan ada 4 pokok kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas laporan keuangan Pemprov Bali. Pertama, sistem pengendalian dalam pemungutan dan penyetoran penerimaan retrebusi daerah yang tidak tertib. Kedua, penatausahaan penerimaan retrebusi UPT Pengelolaan Air Limbah (PAL) yang belum tertib. Ketiga, anggaran belanja modal barang dan jasa tidak sesuai ketentuan. Keempat, penataan usaha aset tetap milik pemerintah yang belum tertib.

Meski ada 1.000 rekomendasi BPK yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti, menurut Eddy Mulyadi, secara umum capaian kinerja keuangan Pemprov Bali berada di atas rata-rata nasional, yakni mencapai 81 persen. "Kalau secara nasional, rata-rata baru 50 koma sekian persen," tandas Eddy Mulyadi.

Sementara itu, Gubernur Made Mangku Pastika mengatakan penilaian BPK RI adalah penilaian bagaimana jajaran Pemprov Bali mengelola keuangannya sesuai aturan. "Artinya di sini reduksi shorfall, pemanfaatan setiap rupiah anggaran untuk kesejahteraan rakyat kita, termasuk paling baik," ujar Pastika menjawab pertanyaan soal korelasi antara predikat WTP dan kesejahteraan masyarakat, seusa sidang paripurna kemarin.

Gubernur Pastika menegaskan, kalau mengukur kesejahteraan masyarakat, seharusnya rakyat sudah merasakan. Sebab, anggaran-anggaran yang digelontor Pemprov Bali cukup signifikan. "Misalnya, untuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan modal kepada usaha kecil," tandas Pastika.

"Sekarang tergantung masyarakat. Kita sudah kasi kail, mereka mau atau tidak memanfaatkan kail itu? Mau nggak mereka mancing? Janganlah malas-malasan, jangan diam terus. Kayak program kita Balai Latihan Kerja (BLK) itu kan memberikan kail. Sekarang tergantung anak-anak kita saja," lanjut Gubernur Bali Pertama asal Buleleng ini.

Kendati Pemprov Bali kembali mendapatkan rapor tertinggi WTP, Pastika tak mau terlena. Bahkan, Senin kemarin Pastika langsung mengumpulkan jajaran pimpinan SKPD di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar. Masalahnya, Pemprov Bali masih harus

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 15



menghadapi audit BPK soal APBD Perubahan 2015 dengan sistem akrual, lebih detail lagi. "Sekarang kan pemeriksaannya global dan menyeluruh untuk laporan keuangan. Tapi, untuyk audit APBD Perubahan 2015 nanti, dilakukan dengan sistem akrual. Misalnya, pemanfaatan aset, harus rinci dijelaskan item-itemnya. Penggunaannya bagaimana, untuk apa saja, berapa semuanya? Lebih detail sifatnya," ungkap Inspektur Provinsi Bali, Ketut Teneng.

Menurut Ketut Teneng, jajaran SKPD Pemprov Bali sudah mulai digenjut lagi, mulai Selasa (9/6) ini. "Tadi kita dimintai tidak senang-senang dulu. Karena masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pak Gubernur mengingatkan tetap kerja, yang sudah menjadi kesalahan sebelumnya jangan diulangi. Hanya keledai yang mengulangi kesalahan yang sama," tegas birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Pemprov Bali sendiri berhasil naik kelas dengan meraih opini WTP dari BPK untuk kali pertama, setahun lalu. Kala itu, opini WTP diraih atas audit LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013. Sebelum naik kelas ke opini WTP, Pemprov Bali sempat harus menunggu lama karena selama 5 tahun berturut-turut berkat pada predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP). Berbagai temuan soal aset, selalu jadi kendala Pemprov Bali dalam upaya meraih WTP.

Pasca naik kelas, kali ini Pemprov Bali kembali dapat opini WTP atas audit LKPD Tahun Anggaran 2014. Yang membanggakan, bukan cuma Pemprov Bali yang meraih WTP tahun ini. Bahkan, dari 9 Pemkab/Pemkot se-Bali, 6 daerah di antaranya dapat opini WTP tahun 2015 ini, yakni Badung, Denpasar, Tabanan, Buleleng, Jembrana, dan Gianyar. Tercatat hanya 3 daerah yang masih berkat dengan predikat WDP tahun ini, masing-masing Bangli, Klungkung, dan Karangasem.

Perlu dicatat, Denpasar sudah meraih predikat WTP empat tahun secara berturut-turut yakni 2012, 2013, 2014, dan 2015. Sedangkan Badung sempat sekali jatuh ke predikat Tidak Wajar tahun 2014, sebelum kembali ke jalur WTP tahun 2015 untuk melengkapi predikat serupa pada 2012 dan 2013. Sebaliknya, Tabanan, Buleleng, Gianyar, dan Jembrana untuk kali pertama dapat rapor WTP tahun 2015 ini. nat

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 15